

PERAN KOALISI PEREMPUAN (KPI) KOTA SALATIGA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)

Tika Ifrida Takayasa¹ Muhammad Nuqlir Bariklana² Siti Azizah³

FISIP UIN Walisongo, Semarang – Indonesia
tikatakayasa@walisongo.ac.id

Abstract

This study reveals the roles and strategies of women's organizations in the development of Renewable Energy (EBT) in Indonesia. The analysis of the study is based on examining the roles and strategies of the Indonesian Women's Coalition (KPI) in developing the empowerment of renewable energy in Salatiga City. This study was conducted using qualitative methods and the theory of the role of NGOs as an analysis framework. The important findings of this study reveal that the role of the Indonesian Women's Coalition (KPI) in Salatiga city in developing renewable energy (EBT) with Education Development, Participation and Empowerment, Advocacy, and Networking strategies. In conducting Advocacy, KPI using two approaches, a top-down approach through cooperation with the government and related agencies and the grassroots approach to listening to aspirations from below by establishing *Balai Perempuan* as a center for Information complaints and advocacy on renewable energy (BP PIPA EBT), BP PIPA EBT is a milestone in the development of EBT in society. In the development of EBT, in the framework of the Strategic Partnership for Green and Inclusive Energy (SP-Energy), KPI also builds a network with similar organizations that are concerned with the development of renewable energy (EBT) in Indonesia.

Studi ini mengkaji tentang Peran dan strategi organisasi perempuan dalam pengembangan Energi baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Analisis kajian dilakukan dengan mengkaji peran dan strategi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam meningkatkan pemberdayaan energi baru terbarukan Kota Salatiga. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan teori Peran LSM sebagai kerangka analisis. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa peran Koalisi Perempuan (KPI) di Kota Salatiga dalam pengembangan EBT menggunakan strategi Pengembangan Pendidikan, Partisipasi dan pemberdayaan, Advokasi serta Jaringan. Dalam Melakukan Advokasi KPI Kota Salatiga menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas ke bawah (*top to bottom approach*) dengan kerjasama dengan pemerintah dan dinas terkait serta pendekatan akar rumput (*grassroot approach*) untuk mendengarkan aspirasi dari bawah dengan membentuk Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan advokasi (BP PIPA EBT) yang menjadi tonggak dalam pengembangan EBT di masyarakat. Dalam pengembangan EBT, KPI membangun jaringan bersama LSM yang juga mempunyai perhatian khusus mengenai isu energi dalam kerangka Strategic Partnership Green and Inclusive Energy (SP-Energy).

Keywords: KPI, EBT, Gender, Energi baru terbarukan

¹ Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

² Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

³ Prodi Sosiologi FISIP Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang melanda menjadikan peranan perempuan dalam energi khususnya pada ranah domestik semakin besar. Sektor energi sangat terpengaruh dikarenakan banyak Kota menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Seluruh kegiatan masyarakat akhirnya dilakukan di rumah seperti bekerja dari rumah (WFH) dan belajar dari rumah (SFH). Akibatnya penggunaan energi listrik dan gas untuk rumah tangga melonjak tinggi meski permintaan energi pada transportasi menurun dan beberapa produksi kendaraan listrik terhenti (IESR, 2020). Rumah menjadi pusat kegiatan dan penggunaan energi yaitu menjadi Kantor, sekolah, masjid bahkan klinik untuk isolasi mandiri.

Pada masa Pandemi peran perempuan di dalam rumah bertambah dari memastikan logistik bagi keluarga, membersihkan rumah sampai mengawasi pembelajaran pada anak. Namun peran tersebut tidak di sertai dengan kerjasama yang baik antar anggota keluarga, justru tercatat, ada kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di banyak negara sampai 30-50 persen selama pandemi ini UNIFEM (2020). Menurut laporan LBH APIK Jakarta, pada periode 9 bulan tahun 2020 tercatat 225 kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga (KDRT) (LBH APIK 2020). Beban perempuan menjadi semakin besar namun tidak disertai pemahaman dan pengertian mengenai penggunaan energi yang aman dan prinsip kesalingan antar anggota keluarga. Keluarga yang tidak paham dengan norma diskriminatif gender tidak mengenal pembagian peran domestik

yang membuat beban perempuan semakin besar.

Energi mempunyai peranan penting untuk menggerakkan roda perekonomian dalam kehidupan. Energi adalah sebuah kemampuan untuk melakukan pekerjaan, berupa panas, cahaya, mekanika, kimia dan elektromagnetik (DPR RI, 2007). Cadangan Energi Indonesia pada tahun 2018 semakin menurun dimana cadangan minyak yang telah di produksi sebanyak 92,1% dan gas bumi telah diproduksi sebanyak 34,5% terhadap total seluruh cadangan negara (BNPT, 2020). Melalui data tersebut maka diperkirakan cadangan minyak akan habis dalam waktu 9 tahun dan gas dalam waktu 42 tahun. Maka dari itu diperlukan energi alternatif yang disebut energi baru terbarukan (EBT). Energi baru terbarukan (EBT) adalah energi yang bersumber dari alam yang dengan cepat dapat dipulihkan secara berkesinambungan tanpa menunggu jutaan tahun lamanya. Beberapa sumber energi baru terbarukan antara lain, energi panas bumi, energi angin, biomassa, tenaga surya, tenaga arus air, hidrogen serta energi laut (KPI, 2019).

Bagi perempuan ketersediaan energi bersih sangat dibutuhkan dalam kehidupan dari keperluan domestik, kesehatan sampai peran sosial di masyarakat. Perempuan pedesaan yang masih menggunakan tungku kayu bakar tradisional berpotensi menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dari pada perempuan yang menggunakan energi biogas untuk mengolah makanannya. Dengan penggunaan alat elektronik maka pekerjaan domestik akan lebih mudah dan cepat, sehingga perempuan dapat

melakukan peran sosial di masyarakat dan mempunyai waktu untuk beristirahat dan berkarya lebih banyak. Sebaliknya apabila tidak menggunakan energi listrik dalam melakukan pekerjaannya maka perempuan akan tersita waktunya untuk melakukan banyak pekerjaan rumah tangga (KPI, 2019).

Akses dari energi terutama EBT diperlukan untuk menghemat pengeluaran dikarenakan perempuan mengabdikan dana yang tidak sedikit jika tidak menggunakan energi dalam pekerjaan domestiknya. Peningkatan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari adanya ketersediaan dana, kualitas hidup sehat dan adanya waktu untuk bersosialisasi dan istirahat bagi perempuan. Semakin rendah akses energi terutama EBT maka menunjukkan semakin kecil kesempatan keberdayaan bagi perempuan.

Ketika penggunaan energi tidak disertai dengan pengetahuan yang cukup mengenai keamanan dan prosedur penggunaannya maka akan sangat berbahaya bagi perempuan. Khususnya, penggunaan energi seperti bahan bakar minyak, kayu bakar, gas LPG yang residunya berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan dan secara tidak langsung akan mempengaruhi keberlanjutan kehidupan manusia pada umumnya. Selama ini perempuan tidak memiliki akses dalam mengelola energi hanya sebatas pengguna dan konsumen. Maka perempuan tidak mempunyai akses pada ketersediaan energi dan pengaturan harga serta kepastian keamanan produk yang diterima. Kendala dari minimnya sosialisasi cara penggunaan energi dari segi keamanan, akses distribusi

pemeliharaan dan kesulitan teknis lainnya (KPI Salatiga, 2019).

Sesuai dengan dengan teori *The Development and human needs*, kebutuhan energi bagi manusia khususnya perempuan merupakan kebutuhan dasar manusia (*Fundamental Human Needs*), yaitu penghidupan layak (*subsistence*) (Max-Neef, 2007). Ketiadaan energi berdampak buruk pada perempuan dalam hal kesehatan seperti faktor kelelahan secara fisik dan mental. Tanpa energi maka layanan kesehatan akan buruk dan berdampak pada reproduksi dan keberlangsungan manusia (KPI, 2019). Perempuan juga membutuhkan keamanan (*protection*), ketiadaan energi penerangan akan menjadikan perempuan menjadi korban kriminalitas. Pada aspek sosial energi dapat membantu memudahkan perempuan untuk memenuhi haknya dalam berekspresi, bersosialisasi dan berorganisasi (KPI, 2019).

Aminatun Zubaedah dalam tulisannya menyatakan peran perempuan dikotak – kotakkan secara sistemik dan struktural sehingga mengakibatkan perempuan hanya berada pada ranah domestik saja sedangkan kegiatan pertanian yang produktif dikelola laki-laki. Perempuan juga tersingkirkan dalam pengelolaan energi baru terbarukan karna dianggap kurang cakap dan mampu (Zubaedah, Prakoso, Arruzii, 2017).

Strategi pengarusutamaan gender di dalam pembangunan energi diikuti kebijakan pemerintah yang tercantum pada inpres No.09 tahun 2000 dapat menjamin perempuan untuk turut serta berkontribusi dan berperan aktif didalam pengelolaan

sumber energi dan mempengaruhi kebijakan. Di lapangan Pekerjaan konstruksi pada instalasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Tanjung Jabung, Jawa Timur, melibatkan perempuan dalam penyusunan desain dan pemeliharaan. Seharusnya perempuan dapat terlibat lebih banyak pada semua kegiatan dengan menghilangkan stigma negatif tersebut (Zubaedah, Prakoso, Arruzi, 2017).

Batliwala dan Reddy dalam penelitiannya menerangkan pola konsumsi energi di sebuah desa seperti Pura di India menunjukkan bahwa perempuan bekerja lebih lama daripada pria. Pada bidang pertanian perempuan mendapat pekerjaan berat yang menciderai punggungnya seperti menanam, memanen dan menyiangi. Perempuan juga mendapatkan sedikit energi makanan dibanding laki-laki karena budaya patriarki. Bahaya kesehatan dalam penggunaan biomassa mengancam bagi perempuan pedesaan. Intervensi dalam distribusi gender dalam pengelolaan energi dan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Batliwala, Reddy, 2003).

Cornelia Fraune dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor budaya, sosial dan politik juga mempengaruhi partisipasi individu pada sebuah lembaga asosiasi warga di dalam energi baru terbarukan. Budaya di Jerman yang masih berorientasi pada laki-laki, menyulitkan perempuan untuk meraih posisi yang lebih tinggi pada lembaga tersebut. Tingkat partisipasi kepemilikan perempuan dalam pengelolaan energi terbarukan lebih rendah daripada

laki-laki. Tingkat keterwakilan perempuan di Parlemen juga masih rendah terutama dalam isu energi terbarukan. Sehingga aspirasi perempuan mengenai energi terbarukan tidak tersampaikan (Fraune, 2015).

Menurut Lubis dalam tulisannya menyatakan bahwa partisipasi perempuan pedesaan masih sangat minim hanya terfokus pada ranah domestik saja. Dengan adanya perkembangan ET (Energi Terbarukan) diharapkan partisipasi perempuan lebih menyeluruh mulai dari perencanaan, pembangunan, pengoperasian, kewirausahaan serta pemeliharaan ET. Pengelolaan dari ET sangatlah mudah dapat dilakukan baik laki- laki dan perempuan. Strategi awal yang dapat dilakukan perempuan adalah menggunakan jejaring kelompok, memetakan potensi serta mengembangkan pelatihan dan sosialisasi mengenai Energi Terbarukan (ET) (Lubis, 2011).

Dengan melihat literatur diatas penulis ingin menyoroti tentang pentingnya keterlibatan sebuah organisasi yang memusatkan perhatiannya pada pemberdayaan perempuan seperti KPI. Dengan adanya organisasi yang terstruktur akan memudahkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang khususnya dalam pengelolaan EBT. Informasi mengenai penggunaan energi yang aman serta sosialisasi penggunaan EBT bagi perempuan sangat dibutuhkan. Strategi advokasi mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam isu ini akan berdampak pada kebijakan pemerintah serta

kesempatan kerjasama bagi perempuan dalam peningkatan penggunaan EBT.

Pembangunan yang berkelanjutan mendorong demokrasi yang partisipatif maka sejalan dengan misi dari KPI sebagai Organisasi yang memperjuangkan perempuan untuk demokrasi dan keadilan. Hal ini akan mendorong solusi yang lebih kreatif yang dihimpun dari akar rumput menuju pada tingkatan negara. Dalam Hal ini KPI Kota Salatiga merupakan sebuah Organisasi Masyarakat atau yang biasa disebut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mempunyai Peran khususnya pada bidang Pembangunan Masyarakat dan lingkungan hidup. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) memfokuskan untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai dan prinsip kejujuran, keterbukaan dan kesetaraan, serta menolak segala bentuk diskriminasi, serta merawat lingkungan. Beberapa peran LSM Menurut (Willis, 2005) adalah :

- a) Bantuan darurat
- b) Pengembangan pendidikan;
- c) Partisipasi dan pemberdayaan
- d) Swasembada
- e) Advokasi
- f) Jaringan;

Dalam studi ini penulis membatasi peran KPI sebagai LSM/ NGO sesuai dengan Fakta di lapangan bagaimana Peran KPI Kota Salatiga dalam pemberdayaan perempuan di bidang energi baru terbarukan (EBT) diantaranya Pengembangan Pendidikan, Partisipasi dan pemberdayaan, Advokasi serta Jaringan. KPI adalah organisasi yang bersifat gerakan pemberdayaan perempuan untuk keadilan dan demokrasi. KPI

mempunyai fungsi untuk memperjuangkan keadilan di seluruh sisi kehidupan perempuan dan masyarakat pada umumnya. salah satunya keadilan dalam mendapatkan hak untuk memanfaatkan energi baru terbarukan. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) cabang Kota Salatiga melakukan advokasi dan sosialisasi bahwa energi bersih terbarukan sebagai hak warga negara melalui Balai Perempuan (BP). Perempuan memiliki kepentingan terhadap ketersediaan energi bersih terbarukan untuk kegiatan domestik dan publik. (Hidayah, 2020).

Kota Salatiga adalah salah satu Kota dengan partisipasi perempuan yang aktif didalam pengelolaan energi. Dengan adanya Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Salatiga dan Balai Perempuan (BP) sebagai Pusat Informasi dan Advokasi terutama dalam EBT menjadi sangat menarik untuk dikaji. Bagaimana Peran KPI sebagai salah satu organisasi Perempuan yang menyuarakan Informasi mengenai EBT bagi perempuan di Kota salatiga. Serta strateginya dalam melakukan advokasi dan kolaborasi terhadap pemerintah yang juga mempunyai perhatian khusus terhadap energi terbarukan.

Kondisi penggunaan EBT di Kota salatiga belum terpenuhi dan perempuan sebagian besar menggunakan energi fosil untuk memenuhi kebutuhannya. Peran perempuan yang dominan dalam penggunaan dan pengelolaan energi masih terpinggirkan. Ditambah partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait energi dari kelurahan, kota sampai tingkat nasional masih sedikit dikarenakan

keterbatasan akses dan pengetahuan mengenai EBT.

Peran organisasi perempuan dibutuhkan baik di negara berkembang seperti India dan Indonesia serta negara maju seperti Jerman yang masih berorientasi pada laki-laki. Keterwakilan perempuan di parlemen juga merupakan faktor untuk memperkuat posisi perempuan dalam kesetaraan pada akses energi terbarukan. Dengan strategi pengembangan pendidikan, partisipasi dan pemberdayaan, Advokasi serta jaringan yang dilakukan oleh KPI kota Salatiga diharapkan persoalan dari solusi dari beberapa persoalan perempuan pada pengelolaan EBT.

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan peran Koalisi Perempuan Indonesia Kota Salatiga (KPI) sebagai organisasi Pemberdayaan Perempuan yang memperjuangkan keadilan dan demokrasi di ranah masyarakat khususnya perempuan dalam pemberdayaan energi baru terbarukan. Lebih spesifiknya, studi ini berupaya untuk menjelaskan: (1) Peran Koalisi Perempuan Indonesia Kota Salatiga (KPI) dalam mendampingi dan mensosialisasikan EBT terhadap masyarakat (2) Strategi Koalisi Perempuan Indonesia Kota Salatiga (KPI) dalam mengadvokasi kebijakan yang mengarah pada perlindungan dan pemberdayaan energi terbarukan pada perempuan. Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada kegiatan yang telah dilakukan KPI dalam pemberdayaan energi khususnya di Kota salatiga.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, langkah-langkah yang telah

dilakukan antara lain, yang pertama adalah studi literatur. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian, antara lain: konsep tentang energi baru terbarukan, dan informasi mengenai kondisi energi terbarukan di Indonesia. Serta peran organisasi perempuan di dalam energi terbarukan dalam hal ini KPI kota Salatiga menjadi objek dari penelitian ini. Sedangkan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) terhadap sekretaris cabang KPI Kota Salatiga. Dan melakukan FGD (*Focused Group Discussion*) mengenai EBT pada Kementerian ESDM dan JP3A Jawa Tengah bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Wilayah Jawa Tengah. Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan dengan observasi lapangan dan melihat penggunaan energi terbarukan di beberapa rumah warga di kota salatiga. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana penggunaan energi baru terbarukan (EBT) yang telah di aplikasikan di masyarakat Kota Salatiga.

Potensi Energi Terbarukan di Kota Salatiga.

Kota Salatiga terletak ditengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Penggunaan lahan secara administratif Kota salatiga terbagai menjadi 4 Kecamatan dan 24 Kelurahan. Kelurahan yang menjadi area dari penelitian adalah Kelurahan Blotongan, Noborejo, Kutowinangun Lor dan Mangunsari. Penelitian yang dilakukan berfokus pada penggunaan energi untuk keperluan domestik seperti memasak. Kota Salatiga tidak memiliki kendala dalam penggunaan listrik. Mayoritas masyarakat menggunakan kompor gas, tungku serta kayu bakar untuk memasak(KPI, 2019).

Penyuluhan mengenai penggunaan biogas di Kota Salatiga dibantu oleh Serikat Paguyuban

Petani Qaryah Tayyibah (SPPQT)⁴ kepada kelurahan Blotongan dan Sidorejo Kidul. Ketua KPI Cabang Kota Salatiga juga menginisiasi untuk menginstalasi biogas di rumahnya untuk memasak. Kendala yang ditemukan bahwa modal instalasi awal memakan biaya yang tidak sedikit sehingga penggunaan biogas belum dapat dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh (KPI, 2019).

Beberapa Potensi Energi Terbarukan di Kota Salatiga yaitu berada di Blotongan Timur, Kecamatan Sidorejo, sebagian masyarakat yang mempunyai ternak menggunakan kotoran ternaknya menjadi biogas. Namun jumlah penduduk yang mempunyai sapi tidak banyak dan tidak semua yang mempunyai sapi menggunakannya untuk biogas karna keterbatasan informasi dan biaya.

Di Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir mempunyai potensi energi yang bisa dikembangkan yaitu *septik tank* komunal di RW Kali Pancur namun belum dimanfaatkan menjadi EBT (Hidayah, 2020). Masyarakat sebagian besar menggunakan gas LPG ukuran 3kg dan sebagian masyarakat juga menggunakan tungku kayu bakar untuk memasak. Di Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo mempunyai potensi EBT yaitu kotoran ternak sapi baik secara individu dan komunal yang digunakan sebagai biogas oleh masyarakat.

Di Kelurahan Noborejo, Kecamatan Argomulyo juga terdapat Mata air sebagai sumber energi bersih namun seringkali kering ketika kemarau. Masih ada masyarakat yang

menggunakan tungku kayu bakar sebagai satu-satunya energi untuk memasak dikarenakan keterbatasan ekonomi. Di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti merupakan wilayah yang padat penduduknya, sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang. Sebagaimana menggunakan gas LPG untuk memasak dikarenakan sebagai usaha berdagang dengan penggunaan yang mudah. Sumber EBT seperti ternak sedikit dan belum dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif Masyarakat hanya menggunakan kotoran untuk pupuk tanaman.

Pengarusutamaan Gender dalam Energi Baru Terbarukan

Melihat dari letak Geografis, Indonesia mempunyai potensi besar energi baru terbarukan (EBT) dengan sumber daya alam melimpah serta cuaca yang mendukung. Beberapa keunggulan dari Energi terbarukan (EBT) adalah ramah lingkungan, mendorong perekonomian, menciptakan peluang kerja dan mudah digunakan di daerah terluar dan terpencil serta dimanfaatkan secara berkesinambungan dengan teknologi yang tepat. Namun, Indonesia masih sangat bergantung dengan sumber energi fosil yang berdampak pada lingkungan hidup terutama manusia di dalamnya. Dengan terus menerus menggunakan energi fosil berarti melegalkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Ketidakterediaan energi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah berarti melanggengkan kemiskinan. Pengabaian prinsip keadilan dan kesetaraan gender

⁴ SPPQT (Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thoyyiban) adalah suatu organisasi massa petani yang berdomisili di Salatiga.

dalam kebijakan dan program di bidang energi menimbulkan kerugian bagi perempuan dan anak (Semai, 2018).

Sejumlah kebijakan pemerintah terkait energi baru terbarukan (EBT) belum mengatur keterlibatan perempuan dan masyarakat pada umumnya apalagi menysasar pada pemenuhan energi di tingkat rumah tangga (KPI, 2019). Diskusi mengenai isu energi tidak pernah dibicarakan oleh perempuan dikarenakan energi dianggap topik yang maskulin dan berjarak dengan perempuan. Namun dilapangan perempuan merupakan pengguna aktif energi terbesar di dalam skala rumah tangga. Peran domestik perempuan berkaitan langsung dengan penggunaan energi. Dari mulai kegiatan memasak, mencuci dan menyetrika, dimana porsi terbanyak dilakukan oleh perempuan (KPI Salatiga, 2019).

Saat ini perempuan dianggap hanya sebagai pengguna energi dan tidak memahami prosedur keamanan dikarenakan kurangnya Informasi dan sosialisasi yang tepat bagi energi tersebut. Sebagian Kelompok perempuan mampu menghasilkan energi listrik dan api dari biogas untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Partisipasi perempuan dalam pengembangan EBT kurang diperhitungkan dan pengembangan EBT seringkali tidak melibatkan perempuan karena dianggap isu yang maskulin. Akibatnya perempuan tidak memahami dan tidak dapat mengambil manfaat dari pengembangan EBT. Perempuan tidak mengetahui kebutuhannya (*needs*) dan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhannya. Adanya informasi dan peningkatan kapasitas perempuan

dalam energi terbarukan akan mendorong partisipasi perempuan untuk mewujudkan Energi bersih Terbarukan (EBT).

Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan publik dan kebijakan terkait energi. Tujuan Pembangunan berkelanjutan pada negara sebuah memiliki prinsip meluas dan merata. Maka negara dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan jika dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali perempuan dan kelompok rentan. Stigma negatif terhadap perempuan dimana EBT merupakan urusan pembangunan yang teknis tidak sesuai dengan perempuan yang tidak mempunyai kapasitas dan pendidikan rendah. Dengan mengembangkan EBT maka negara dapat mewujudkan energi yang demokratis karena dapat digunakan dengan skala yang sangat beragam di banyak tempat (IESR, 2020).

Pengembangan EBT harus melibatkan perempuan agar perempuan dapat ikut serta mengambil kebijakan terkait energi dengan metode pengarusutamakan gender. Keterlibatan perempuan diharapkan akan menghindarkan dari bahaya dan bencana yang diakibatkan oleh penggunaan energi yang tidak sesuai prosedur. Perempuan dapat memanfaatkan biogas untuk memasak dan mikro hidro untuk listrik dalam kebutuhan rumah tangganya.

Ketika perempuan memahami penggunaan dan dilibatkan dalam pengembangan EBT maka dapat menggunakan energi dengan lebih aman, sehat dan produktif sehingga dapat berperan

serta dalam pembangunan yang berkesinambungan. Beban ekonomi keluarga dalam penggunaan energi akan lebih murah dan bersih apabila menggunakan energi bersih terbarukan (EBT). Maka pengarusutamaan gender dalam pengembangan EBT merupakan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan juga demokrasi terutama dalam isu energi terbarukan.

Peran KPI dalam pemberdayaan EBT di Kota Salatiga

Sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dengan basis kaderisasi, KPI menilai kapasitas kadernya terhadap isu lingkungan masih kurang. Salah satu isu lingkungan yang dirasa paling relevan dengan perempuan adalah isu energi bersih dan terbarukan, mengingat energi berdampak besar tidak hanya pada lingkungan, tapi juga pada aspek kesehatan, sosial, dan budaya pada masyarakat, khususnya perempuan. Oleh karena itu, KPI menyelenggarakan pendidikan kader dasar membentuk Balai Perempuan (BP) sebagai Pusat Informasi Perempuan dan Advokasi (PIPA) Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk memfasilitasi perempuan sebagai rujukan dalam meningkatkan kesadaran mengenai Energi Bersih Terbarukan. Hal ini dilakukan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap persoalan energi yang dialami oleh perempuan dan masyarakat pada umumnya. Koalisi perempuan Indonesia telah melakukan assessment terkait energi terbarukan di 2 wilayah dan 2 cabang salah satunya adalah Kota Salatiga (KPI Salatiga, 2019).

Pelatihan dan pendidikan kader dilakukan di satu desa di Salatiga dan empat desa di Kabupaten Semarang. Pendidikan dan pelatihan ini berlangsung selama 4 hari di tiap-tiap desa sejak bulan Februari hingga Maret 2019. Pelatih kader pun didatangkan dari beberapa pengurus wilayah Provinsi Jawa Tengah. Diharapkan setelah terbentuknya BP PIPA EBT di tingkat desa, kader yang telah memiliki kapasitas lebih terhadap isu lingkungan dan pengaruhnya terhadap perempuan, mampu melakukan pembelaan (advokasi) terkait isu-isu tersebut yang ada di komunitas dan wilayah masing-masing (KPI Salatiga, 2019).

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) saat ini belum menguasai dalam bidang EBT, maka diperlukan membangun jaringan kerja dengan organisasi lain yang memiliki perhatian khusus mengenai EBT baik dari kalangan pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi sampai kelompok masyarakat bawah. KPI membuka Jaringan seluas-luasnya untuk memudahkan dalam gerakan pemberdayaan perempuan khususnya pada isu EBT. Pada Isu energi terbarukan KPI tergabung dalam Strategic Partnership Green and Inclusive Energy (SP-Energy).

Mandat organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) salah satunya adalah sebagai kelompok pengkaji dan pengusul kebijakan. Sebagai organisasi yang berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang adil gender, Koalisi Perempuan Indonesia melihat pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses-proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan publik. Termasuk didalamnya

bagaimana produk kebijakan juga harus memiliki perspektif keadilan gender dan inklusi sosial. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan bidang energi ini juga harus memiliki perspektif gender dan inklusi sosial. Keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya menjadi keharusan (KPI, 2019).

Strategi KPI dalam pengembangan EBT di Kota Salatiga

1. Advokasi Kebijakan Politik tentang energi baru terbarukan (EBT)

Langkah advokasi merupakan sebuah usaha yang terorganisir dan sistematis untuk mempengaruhi dan mendesak sebuah perubahan untuk membantu kaum lemah dalam konteks ini perempuan. Menurut Loue ada dua tipe advokasi yaitu *Grass root approach* (pendekatan akar rumput), selanjutnya *Top down approach* (pendekatan dari atas kebawah)(Loue, 2006). KPI Kota Salatiga melakukan strategi advokasi menggunakan kedua strategi tersebut

Beberapa upaya KPI dalam mempengaruhi kebijakan terkait energi didasarkan pada penelitian dan bukti di lapangan. Beberapa anggota KPI belum memahami informasi mengenai EBT dan tidak mengetahui potensi sumber-sumber EBT yang ada di lingkungannya. Dengan latar belakang berikut maka KPI membentuk BP PIPA EBT yang memusatkan perhatian pada informasi, sosialisasi serta advokasi baik kepada anggota maupun perempuan pada umumnya di wilayahnya. Dengan adanya BP PIPA EBT di setiap kelurahan

maka dapat memetakan potensi EBT yang ada.

Balai perempuan merupakan struktur organisasi di tingkat desa yang dibentuk untuk bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat melalui pengorganisasian, pemberdayaan dan advokasi. Permasalahan akses terhadap EBT termasuk akses terhadap listrik dan sarana untuk memasak di desa. Hal ini sesuai dengan UU No.30 tahun 2007 tentang energi (UU Energi) Pasal 20 ayat (2) dan (4) , penyediaan energi oleh pemerintah atau pemerintah daerah. (KPI, 2018).

Saat ini selain terdapat sejumlah peraturan tentang energi di tingkat pusat, pemerintah juga telah menyusun kebijakan energi nasional (KEN) dan rencana umum energi nasional (RUEN). Rencana tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional dan telah dilakukan harmonisasi dengan indikator pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan ke-7 tentang energi. Khusus untuk EBT, DPR RI juga telah membahas rancangan undang-undang tentang EBT (RUU EBT) yang belum disahkan pada periode lalu sehingga menjadi pekerjaan rumah periode saat ini (IESR, 2020).

Dibentuknya BP PIPA EBT berfungsi; *pertama*, untuk mengumpulkan, mengelola menyebarkan data dan informasi tentang hak warga untuk memperoleh akses energi dan kebijakan pemerintah serta pengetahuan tentang energi bersih terbarukan. *Kedua*, menerima dan mendata

pengaduan masyarakat terkait penggunaan energi dan kebijakan pemerintah. Ketiga, bersama dengan kader KPI, tokoh masyarakat menyampaikan permasalahan warga kepada pemerintah dan penyedia layanan. Melakukan pembelaan terhadap hal atas akses energi serta mendorong adanya kebijakan, program dan alokasi dana untuk meningkatkan akses EBT dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau bagi semua warga (KPI, 2018).

Beberapa advokasi yang dilakukan BP PIPA EBT bersama masyarakat untuk mendorong pemerintah menerbitkan atau memperbaiki kebijakan public dan alokasi anggaran untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagai berikut:

a) *Top down approach* (pendekatan dari atas kebawah)

Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi perempuan merasa penting untuk ikut serta atau terlibat aktif dalam proses-proses ini. Baik implementasi kebijakan yang telah ada maupun proses pembahasan RUU EBT. Di tingkat daerah, terdapat daerah yang telah menyusun rencana umum energy daerah (RUED), salah satunya provinsi Jawa Tengah. Mereka juga telah memasukkan rencana pembangunan bidang energi ke dalam RPJMD, melakukan harmonisasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan nawa cita yang diusung presiden Joko Widodo pada periode lalu.

Pembicaraan mengenai Energi baru terbarukan telah dimulai secara formal sejak tahun 2014 dengan lahirnya dua peraturan penting yang mengatur tentang Energi Baru

dan Terbarukan yaitu: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN yang di dalamnya mengatur tentang Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Kedua peraturan tentang EBT merupakan peluang untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap energi. Sayangnya, kedua peraturan tersebut belum mengatur tentang partisipasi masyarakat pada umumnya dan khususnya partisipasi perempuan. Beberapa advokasi dan koordinasi yang telah dilakukan oleh KPI Kota Salatiga:

1. Pemerintah Kota Salatiga

KPI mengusulkan anggaran bagi pengembangan energi baru terbarukan di Kota Salatiga. KPI juga menginisiasi program dari pemerintah dari tingkat RT/RW sampai tingkat pemerintah daerah dalam pengembangan Energi terbarukan di Kota Salatiga (Hidayah, 2020). KPI berkoordinasi dengan beberapa Kelurahan yang aktif menyuarakan terkait isu energi di Kota salatiga adalah Kelurahan Blotongan, Kutowinangun Lor, Mangunsari dan Noborejo. Dari kegiatan tersebut diharapkan program pengembangan EBT di kota salatiga tersampaikan dan melibatkan perempuan di dalam penentuan kebijakan tentang energi dari tingkat paling bawah yaitu RT dan RW melalui PKK yang telah ada.

Berkat koodinasi dengan pemerintah daerah, KPI mengetahui bahwa ada beberapa program yang mendukung pengembangan EBT seperti penggunaan Tungku SHE yang dicanangkan oleh Dinas

Pertanian kepada masyarakat kota Salatiga secara luas.

2. Kementerian ESDM Jawa Tengah

KPI melakukan kunjungan ke Kementerian ESDM Jawa Tengah pada bulan Juli 2020 untuk melakukan diskusi mengenai EBT. Melalui Peraturan Daerah Nomor 12/2018, ESDM menargetkan bauran dan pemakaian energi terbarukan minimal 21,32% pada 2025 dan minimal 28,82% pada 2050. Juga menurunkan penggunaan energi fosil dari 78, 67% pada tahun 2025 dan minimal 71, 17% pada 2050. Selain itu, menargetkan rasio Elektrifikasi mencapai 100% pada 2021(YLKI, 2020).

Beberapa program EBT telah dilakukan oleh ESDM Jawa Tengah dengan mengembangkan panel surya, Pembangkit listrik tenaga air dan angin (BNPT, 2020). Beberapa panel surya telah ditempatkan di atap (*rooftop* PLTS) kantor kedinasan seperti ESDM dan Kantor Bappeda dan Tahun 2017, Dinas Setwan Provinsi Jawa Tengah Sesuai arahan Presiden (PP, No 22, 2017). Namun anggaran ESDM untuk EBT pada tahun 2020 terkendala oleh refocusing anggaran pandemi sehingga pengembangan EBT di tahun ini kurang maksimal.

Diskusi dan supervisi dilakukan KPI dengan Kementerian ESDM Jawa Tengah dengan menyampaikan progress yang telah dilakukan anggota kelompok dalam mengembangkan EBT di ranah domestik. Koordinasi dilakukan bersama dengan KPI Kabupaten Semarang dan KPI Wilayah Jawa tengah. Kementerian ESDM menyambut baik dan mendukung keterlibatan aktif perempuan dalam pengembangan energi

baru terbarukan. Program KPI kota Salatiga dalam pengembangan EBT oleh perempuan sejalan dengan program ESDM yang mempunyai payung hukum dimana melibatkan masyarakat dalam membangun energi baru terbarukan(YLKI, 2020). Dengan kunjungan tersebut KPI mendapatkan pengetahuan mengenai progres pembangunan EBT di Provinsi Jawa tengah dan potensi energi baru yang dapat dikembangkan di daerah masing-masing. Hal ini dapat di informasikan kembali kepada BP PIPA EBT untuk disampaikan ke masyarakat luas.

3. DP3A Jawa Tengah

Pada bulan Agustus 2020, KPI juga melakukan diskusi bersama di Kantor DP3A Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut KPI Kota Salatiga, KPI Kabupaten Semarang sebagai wakil dari KPI Jawa Tengah menayangkan beberapa progres yang telah dilakukan di tingkat kota mengenai perkembangan Energi terbarukan. DP3A menyambut baik pergerakan perempuan dalam meningkatkan pemberdayaan khususnya pada bidang EBT yang saat ini belum menjadi bahasan di DP3A. Hal ini menjadi masukan bagi DP3A dalam pemberdayaan perempuan pada isu energi terbarukan (Hidayah, 2020).

Dalam paparannya KPI Kota Salatiga mengungkapkan, perempuan masih menjadi pihak yang terpinggirkan dari perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan, serta pemantauan pembangunan energi terbarukan. Padahal perempuan memiliki peran strategis dalam menyediakan sumber daya alam untuk mengembangkan energi terbarukan. Untuk itu, Koalisi Perempuan

Indonesia akan mendorong pemenuhan kebutuhan dan akses energi masyarakat Indonesia terpenuhi dari sistem energi bersih serta inklusif secara sosial dan gender yang menciptakan peluang ekonomi dan berkontribusi pada mitigasi perubahan di Kota Salatiga dan Jawa tengah pada umumnya.

Dengan ada koodinasi dengan DP3A yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan dapat membantu dalam mensosialisasikan secara vertikal ke bawah melalui seluruh dinas di tingkat kota se-Jawa Tengah dan juga melalui kegiatan PKK ibu-ibu yang rutin dilakukan guna membahas mengenai isu energi baru terbarukan (EBT) serta pengetahuan mengenai penggunaan energi dalam rumah tangga secara aman. Melalui DP3A isu EBT dalam tersampaikan baik secara horizontal melalui kedinasan maupun vertikal kepada masyarakat terutama perempuan (Hidayah, 2020).

4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga.

KPI menyampaikan beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas untuk menjadi alternatif energi baru terbarukan di Kota Salatiga. Potensi yang *pertama*, adalah sampah pasar yang berupa sisa sayuran yang sangat banyak dapat diolah dan dimanfaatkan oleh masyarakat kota Salatiga menjadi pupuk kompos dan energi baru terbarukan (EBT). Energi alternatif terbarukan dari sampah sayuran diubah menjadi listrik melalui Microbial Fuel Cells (disingkat MFCs). MFCs merupakan jenis utama dari *bioelectro-chemical system*

(BECs) yang mengonversi biomassa secara spontan menjadi listrik melalui aktivitas metabolisme mikro-organisme (Pant, Van Bogaert, De Smet, Diels, & Vanbroekhoven, 2010). Saat ini pengelolaan sampah pasar belum dilakukan oleh dinas terkait sehingga potensi EBT belum dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya koordinasi tersebut DLH mengusulkan agar KPI dapat berkoordinasi dengan Bank-bank sampah untuk bersinergi untuk pengelolaan sampah di Kota Salatiga.

Potensi *kedua*, *Septic tank* atau jamban komunal yang ada di Kota Salatiga dapat di olah dan dikembangkan menjadi energi alternatif yaitu biogas untuk bahan bakar bagi masyarakat. *Ketiga*, Cuaca Salatiga yang panas sepanjang tahun dapat dimanfaatkan untuk mendirikan panel surya. Hal ini dapat menjadi perhatian untuk anggaran pembangunan kota Salatiga untuk menambahkan panel surya di atap gedung kedinasan dan taman-taman Kota yang berpotensi mendapatkan sinar matahari yang memadai (Hidayah, 2020).

a) *Grass root approach* (pendekatan akar rumput)

Partisipasi perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan mengenai EBT dalam proses musyawarah harus dilibatkan dari mulai tingkat desa atau kelurahan. Aspirasi dari akar rumput harus didengarkan dan disampaikan karena menunjukkan solusi yang praktis pada permasalahan EBT. Masyarakat di daerah dengan keterbatasan infrastruktur berjuang untuk membawa energi yang ramah dan murah. Maka isu mengenai energi adalah suatu kebutuhan dasar (*subsistence*) yang

menyangkut hajat hidup orang banyak terutama perempuan sebagai pengguna energi utama pada ranah domestik.

KPI menginisiasi Balai Perempuan sebagai Pusat informasi, pengaduan dan Advokasi EBT (BP PIPA energi) yang tersebar di seluruh Cabang di Indonesia. Dalam konteks ini BP PIPA energi yang ada di Kota Salatiga Pembentukan BP PIPA EBT di tingkat Desa atau kelurahan sesuai dengan AD/ART KPI sebagai sebuah organisasi. BP PIPA EBT di bentuk dan bersifat sukarela yang bertujuan untuk memastikan perluasan dan pemerataan terhadap energi bersih terbarukan kepada seluruh masyarakat. (KPI, 2018). Strategi Advokasi KPI melalui Balai PIPA Energi melibatkan ibu-ibu PKK dalam pengenalan EBT terhadap perempuan sebagai pengguna energi terbanyak di dalam rumah tangga. Ini adalah sebuah langkah kritis perempuan untuk meningkatkan partisipasi dalam EBT. Sehingga suara perempuan akan lebih di dengar.

Beberapa tujuan dari BP PIPA EBT yang pertama, mengumpulkan dan membagikan informasi dan mengidentifikasi potensi EBT yang dapat dikembangkan masyarakat. Kedua, melakukan dialog kebijakan dengan pemerintah dan membangun jaringan dengan organisasi-organisasi yang menyediakan layanan EBT. Ketiga, melakukan pemantauan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah yang melibatkan perempuan khususnya dalam bidang EBT.

Dengan adanya BP PIPA EBT yang ada di Kota Salatiga diharapkan dapat memfasilitasi perempuan sebagai rujukan dalam meningkatkan kesadaran mengenai Energi Bersih Terbarukan (EBT). Hal ini

dilakukan sebagai sarana untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terhadap persoalan energi yang dialami oleh perempuan dan masyarakat pada umumnya. Beberapa BP (Balai Perempuan) yang berada di beberapa kelurahan di Kota Salatiga melakukan sosialisasi dan diskusi dalam rangka memetakan potensi EBT di lingkungannya. Hasilnya beberapa potensi EBT ditemukan contohnya penggunaan minyak jelantah sebagai pengganti minyak tanah, kotoran ternak sebagai bahan biogas, sampah sayuran di pasar dapat diolah menjadi kompos dan energi terbarukan lainnya (Hidayah, 2020).

Inisiatif dari balai perempuan (BP) seharusnya menjadi acuan dalam pengembangan EBT di tingkat Kota atau bahkan tingkat wilayah sampai nasional. Harapan dari terbentuknya BP PIPA Energi ini maka perempuan berdaya dan menjamin keberlangsungan manusia yang lebih sehat, bersih dan ramah lingkungan. Yang terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran EBT, dan pengorganisasian yang lebih terstruktur serta sistematis (Hidayah, 2020).

2. Pengembangan Pendidikan, Partisipasi dan pemberdayaan EBT di Kota Salatiga.

a) Seminar Nasional

KPI Kota Salatiga mengadakan Seminar nasional dan diskusi publik untuk menyamakan persepsi bersama dalam pengembangan EBT. Wakil walikota Salatiga Muh Haris menyambut baik mengenai diskusi ini dimana keterlibatan perempuan merupakan langkah yang seharusnya dilakukan. Karena perempuan adalah

pengguna aktif energi terutama dalam ranah domestik maka pemahaman mengenai penggunaan dan penghematan energi bagi perempuan sangat dibutuhkan. (Pemkot Salatiga, 2019).

Seminar nasional menghadirkan Narasumber yang berkompeten dalam bidangnya yaitu Ir. Tri Mumpuni yang dikenal sebagai Perempuan Listrik Indonesia dan Eni Lestari dari Dinas ESDM Prov Jateng. Seminar tersebut dihadiri oleh sebanyak 100 peserta yang terdiri dari anggota KPI Cabang Salatiga, SKPD terkait dan juga perwakilan berbagai organisasi perempuan di Kota Salatiga (Pemkot Salatiga, 2019).

b) Pelatihan GALS (*Gender Active Learning System*) dalam isu EBT.

KPI pusat mengadakan pelatihan di Jakarta dan Salatiga. Kota Salatiga dipilih dikarenakan mempunyai anggota yang aktif di dalam BP PIPA Energi dan juga dekat dengan Kabupaten Semarang sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. KPI dengan bantuan HIVOS, YLKI dan IESR merasa berkepentingan untuk melaksanakan pelatihan bagi Balai perempuan dalam pengembangan energi berbasis Gender. Dengan metode GALS para peserta diajak untuk mengutarakan persoalan energi di lapangan dan menggunakan teknik gambar dan bernyanyi. Hal ini dilakukan agar semuanya dapat

mendapatkan informasi meski tidak menggunakan tulisan (Semai, 2018).

Pelatihan dilaksanakan di Hotel Grand Wahid, dengan peserta sebanyak 20 orang dari perwakilan Balai perempuan (BP) Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang pada Oktober 2018. Pelatihan juga dihadiri oleh Sekertaris Wilayah Jawa Tengah, Endah Puspitanti dengan pelatih Dewiyani dari KPI pusat. Dengan adanya pelatihan GALS dalam meningkatkan '*gender awareness*' pada anggota balai perempuan se-Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Diharapkan para peserta ketika kembali ke balai perempuan masing-masing dapat menularkan impian dan menggambarkan impiannya menggunakan metode GALS kepada anggota lainnya. Hasil dari setiap kegiatan tersebut dapat didokumentasikan dan dilaporkan ke KPI cabang Kota Salatiga (Semai, 2018).

c) Pendidikan Konsumen Energi dan Pelatihan penggunaan tungku Sehat hemat energi (SHE).

Masih dalam kerangka *Strategic Partnership Green and Inclusive Energy (SP-Energy)* KPI bersama dengan Hivos⁵ dan IESR⁶ menyelenggarakan Pelatihan Konsumen Energi di Semarang pada tanggal 10 - 14 Desember 2018. BP PIPA Energi dari Kota Salatiga merupakan peserta pelatihan dan pendidikan tersebut (energiterbarukan, 2018).

⁵ Hivos : merupakan organisasi non-pemerintah Belanda yang berdasarkan nilai kemanusiaan. Bersama dengan organisasi masyarakat lokal, Hivos ingin berkontribusi pada dunia yang bebas, adil, dan berkelanjutan.

⁶ Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah think-tank di bidang energi dan lingkungan. IESR

mendorong transformasi menuju sistem energi berkelanjutan dengan melakukan advokasi kebijakan publik yang bertumpu pada kajian berbasis data dan saintifik, melakukan asistensi dan pengembangan kapasitas, serta membangun kemitraan strategis dengan aktor-aktor non-pemerintah.

Pelatihan ini mengajarkan pemahaman secara rasional konsumen dalam kehidupan misalnya penggunaan transportasi, alat elektronik, serta pengetahuan mengenai distribusi dan produksi suatu produk. Berfikir mengenai kebutuhan konsumen dari berbagai aspek baik hukum, ekonomi lingkungan dan keamanan.

Pelatihan energi alternatif menggunakan Tungku Sehat Hemat Energi (TSHE) dari tokoh komunitas di Kulonprogo, Ibu Suprapti, yang sudah berpengalaman dalam pemanfaatan tungku tersebut. Pelatihan dilakukan dengan kegiatan memasak dengan menggunakan tungku yang telah lolos uji. TSHE lebih hemat bahan bakar dan memproduksi lebih sedikit asap sehingga lebih aman penggunaannya bagi perempuan. Masyarakat diharapkan untuk mengganti tungku tradisionalnya menjadi TSHE yang lebih aman (energiterbarukan.org, 2018).

d) Jaringan dan Publikasi

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) tidak bisa berjalan sendiri dalam mensukseskan pengembangan EBT di Indonesia. KPI bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai perhatian yang sama mengenai energi terbarukan yaitu IESR, HIVOS dan YLKI dalam kerangka *Strategic Partnership Green and Inclusive Energy (SP-Energy)*. Beberapa pelatihan seperti GALS, Tungku SHE, Pelatihan Konsumen energi juga ada berkat kerjasama antar lembaga tersebut.

KPI pusat telah menyusun Kertas Posisi tentang perempuan dan EBT yang dapat menjadi bahan analisa kebijakan, untuk dapat melakukan *lobby* dan audiensi dengan Komisi 7 DPR RI dan Kementerian

atau Lembaga terkait. Kertas posisi ini juga dibuat dengan masukan dari IESR, Rumah Energi, IBEKA, LIPI serta YLKI pada sisi penguatan hak perempuan sebagai konsumen energi (Karikasari, 2019).

Beberapa Publikasi juga dibuat seperti majalah SEMAI (Semai, 2018), Buku Membangun BP PIPA EBT sebagai panduan kerja di BP seluruh Indonesia (KPI, 2018). Dengan adanya penelitian dan publikasi maka langkah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Salatiga untuk mengembangkan EBT di daerah juga semakin mudah. Advokasi dan koordinasi dengan Dinas terkait juga dapat dimudahkan dengan Kertas Posisi KPI.

Harapan dari KPI, pengembangan EBT bukan hanya tertuang di kertas posisi saja tapi perlu diwujudkan dan berdampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek ekonomi namun juga bagaimana mengurangi praktik kekerasan berbasis gender. Fokus utama dari KPI yaitu bagaimana mengurangi ketimpangan berbasis gender yang dialami perempuan serta kelompok rentan lainnya dan tetap melakukan advokasi kebijakan, pengorganisasian maupun penguatan jaringan di isu EBT ini (Semai, 2018).

Simpulan

Koalisi Perempuan Indonesia Kota Salatiga (KPI) adalah salah satu organisasi yang memperjuangkan Keadilan dan Demokrasi di ranah masyarakat khususnya perempuan. Dalam hal ini adalah pemberdayaan perempuan dalam isu energi baru terbarukan. Kebutuhan energi bagi manusia khususnya perempuan merupakan

kebutuhan dasar manusia (subsistence). Ketiadaan energi berdampak buruk pada perempuan dalam hal keamanan seperti penerangan jalan dan kesehatan fisik dan mental serta reproduksi.

Hal ini tertuang pada UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Sehingga KPI mengejawantahkan pada Kongres Nasional IV tahun 2014 dalam mandatnya mengurangi kemiskinan perempuan melalui peran aktif dalam program perlindungan sosial dengan memperjuangkan EBT. Hal tersebut disambut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN yang di dalamnya mengatur tentang Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Beberapa Peran Koalisi Perempuan Indonesia Kota Salatiga (KPI) dalam pengembangan EBT adalah sebagai kelompok pengkaji dan pengusul kebijakan yang berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang adil gender. KPI juga melakukan pendampingan, sosialisasi, serta pelatihan kader bagi Balai Perempuan PIPA EBT yang ada di Kota Salatiga. KPI Kota Salatiga juga memetakan potensi EBT yang dapat dikembangkan serta mencari solusi bagi permasalahan energi yang ada di lapangan dapat dikomunikasikan dengan Dinas terkait di Kota Salatiga.

Beberapa Strategi yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia Kota Salatiga (KPI). *Pertama*, dengan Advokasi baik dengan model pendekatan akar rumput (*grassroot approach*) dalam hal ini KPI menginisiasi BP PIPA EBT sebagai pusat informasi, pengaduan dan advokasi dalam pengembangan EBT sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi dan sosialisasi yang tepat mengenai penggunaan energi yang bersih dan terbarukan dengan aman. Di Balai tersebut juga diadakan pelatihan dan diskusi mengenai potensi EBT yang ada di setiap daerah. Selanjutnya advokasi dengan pendekatan dari pendekatan dari atas kebawah (*Top down approach*). Advokasi dilakukan terhadap organisasi pemerintah Seperti, Kementerian ESDM Jawa Tengah, DP3A Jawa Tengah, Pemerintahan Kota Salatiga, serta Dinas Lingkungan Hidup kota Salatiga. Hal ini menjadikan kesepahaman dan kerjasama antara Dinas terkait untuk mewujudkan pengembangan serta solusi bagi permasalahan EBT di Kota Salatiga.

Strategi selanjutnya melalui pengembangan Pendidikan, Partisipasi dan pemberdayaan EBT di Kota Salatiga. KPI dengan bantuan dari organisasi Non Pemerintah lainnya seperti HIVOS, IESR, dan YLKI beberapa kali melakukan kegiatan dalam pengembangan EBT yaitu Pelatihan GALS, Pendidikan Konsumen Energi dan Pelatihan penggunaan tungku Sehat hemat energi (SHE) serta Seminar Nasional yang membahas mengenai EBT dengan narasumber yang ahli dalam bidangnya.

Terkait itu juga dengan Jaringan dan Publikasi merupakan strategi terakhir bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai perhatian yang sama mengenai

energi terbarukan yaitu IESR, HIVOS dan YLKI dalam kerangka *Strategic Partnership Green and Inclusive Energy* (SP-Energy). Dengan Jaringan tersebut juga KPI dapat memproduksi buku-buku yang berguna bagi pengembangan kader dan informasi yang lebih akurat melalui Kertas Posisi KPI yang dibagikan keseluruh BP PIPA Energi Seluruh Indonesia. KPI juga menerbitkan Buku Panduan dalam membangun Balai

Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi (PIPA) Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Sehingga kegiatan Sosialisasi dan Advokasi yang dilakukan oleh BP PIPA Energi lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- APIK, J. L. (2020). *Gerak Bersama Ciptakan Ruang Aman di Masa Pandemi*. Diambil dari <https://www.lbhapik.org/2020/11/siaran-pers-16haktp-gerak-bersama.html>
- BNPT. (2020). BPPT Outlook Energi - BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI. Diambil 24 November 2020, dari <https://www.bppt.go.id/dokumen/outlook/outlook-energi>
- DPR RI. (2007). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2007 Tentang Energi*. Diambil dari http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2007_30.pdf
- energiterbarukan.org. (2018). Pendidikan Konsumen Energi di Semarang - Energi Terbarukan Inklusif. Diambil 23 Mei 2021, dari [www.https://energiterbarukan.org/](https://energiterbarukan.org/) website: <https://energiterbarukan.org/2018/12/14/pendidikan-konsumen-energi-di-semarang/>
- Fraune, C. (2015). Gender matters: Women, renewable energy, and citizen participation in Germany. *Energy Research & Social Science*, 1(7), 55–65.
- Hidayah, S. (2020). *KPI Kota Salatiga dan Energi Bersih Terbarukan (EBT)*. Salatiga.
- IESR. (2020). Buletin Energi Kita I. Diambil 16 Desember 2020, dari Institute for Essential Service website: <https://iesr.or.id/en/download/buletin-energi-kita-i-2020>
- Karikasari, D. (2019). Pengarusutamaan Gender dan energi Bersih terbarukan. *SEMAI untuk Keadilan dan Demokrasi*, 1–36.
- KPI. (2018). *Membangun Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi (PIPA) Energi Baru dan Terbarukan (EBT)*. Jakarta Selatan: Koalisi Perempuan Indonesia.
- KPI. (2019). *Kertas Posisi Koalisi Perempuan Indonesia*. 1–34.
- KPI Salatiga. (2019). *Energi Baru Terbarukan di Kota Salatiga*.
- Loue, S. (2006). Community health advocacy. *J Epidemiol Community Health*, 60, 458–

463. <https://doi.org/10.1136/jech.2004.023044>
- Lubis, A. (2011). PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMANFAATAN ENERGI TERBAHARUKAN DI PEDESAAN. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 5(2). <https://doi.org/10.29122/JTL.V5I2.308>
- Max-Neef, M. (2007). *Development and human needs*.
- Pant, D., Van Bogaert, G., De Smet, M., Diels, L., & Vanbroekhoven, K. (2010). Use of novel permeable membrane and air cathodes in acetate microbial fuel cells. *Electrochimica Acta*, 55(26), 7710–7716. <https://doi.org/10.1016/j.electacta.2009.11.086>
- Pemkot Salatiga. (2019). Perempuan Kunci Penghematan Energi – Pemerintah Kota Salatiga. Diambil 23 Mei 2021, dari <https://salatiga.go.id/perempuan-kunci-penghematan-energi/>
- PP, N. 2. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional.*, Pub. L. No. 22, 227 (2017).
- Semai. (2018). *Semai Untuk Keadilan dan Demokrasi*. Diambil dari www.koalisiperempuan.or.id
- Srilatha, Batliwala, R. A. K. N. (2003). Energy for women and women for energy (engendering energy and empowering women). *Energy for Sustainable Development*, VII(03), 33–43.
- Willis, K. (2005). *Theories and Practices of Development* (Second Edi). USA and Canada: Routledge.
- YLKI. (2020). *Sekilas Keberadaan Energi Terbarukan di Jawa Tengah*. Diambil dari <https://energiterbarukan.org/assets/2020/10/Sekilas-Energi-Baru-Terbarukan-di-Prov.-Jateng.pdf>
- Zubaedah Aminatun, Prakoso Imam, A. R. K. (2017). *Perempuan dan Energi Terbarukan*. Yogyakarta.